



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1198, 2019

KEMEN-BUMN. Jabatan dan Kelas Jabatan.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER - 05/MBU/10/2019

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan peraturan mengenai kelas jabatan;
  - b. bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebelumnya telah menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/10/2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - c. bahwa permintaan validasi hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/109/M.SM.04/00/2019 tanggal 13 September 2019, sehingga perlu mengatur kembali jabatan dan

kelas jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Usaha Milik Negara tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

Jabatan dan kelas jabatan fungsional keahlian dan fungsional ketrampilan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini.

#### Pasal 3

Jabatan dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-16/MBU/10/2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2019

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
 NOMOR PER-05/MBU/10/2019  
 TENTANG  
 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN  
 ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara	17
2	Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	15
3	Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia	13
4	Kepala Subbagian Pengadaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Jabatan Fungsional	10
5	Kepala Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia	10
6	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	10
7	Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja	13
8	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	10
9	Kepala Subbagian Manajemen Kinerja	10
10	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	13
11	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
12	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	10
13	Kepala Biro Hukum	15
14	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	13
15	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I	10
16	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II	10
17	Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	10
18	Kepala Bagian Bantuan Hukum	13
19	Kepala Subbagian Bantuan Hukum I	10
20	Kepala Subbagian Bantuan Hukum II	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
21	Kepala Biro Umum dan Humas	15
22	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	13
23	Kepala Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan	10
24	Kepala Subbagian Perbendaharaan	10
25	Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi	10
26	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	10
27	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian	10
28	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi	9
29	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata	9
30	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media	9
31	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan	9
32	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan	9
33	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	9
34	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis	9
35	Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan	13
36	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	10
37	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan/Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	10
38	Kepala Bagian Humas dan Protokol	13
39	Kepala Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa	10
40	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	10
41	Kepala Subbagian Protokol	10
42	Inspektur	15
43	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
44	Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi	17
45	Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I	15
46	Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IA	13
47	Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IA-1	10
48	Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IA-2	10
49	Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IB	13
50	Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IB-1	10
51	Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IB-2	10
52	Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi II	15
53	Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIA	13
54	Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIA-1	10
55	Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIA-2	10
56	Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIB	13
57	Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIB-1	10
58	Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIB-2	10
59	Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata	17
60	Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I	15
61	Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IA	13
62	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IA-1	10
63	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IA-2	10
64	Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IB	13
65	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IB-1	10
66	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IB-2	10
67	Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II	15



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
68	Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIA	13
69	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIA-1	10
70	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIA-2	10
71	Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB	13
72	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB-1	10
73	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB-2	10
74	Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III	15
75	Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIA	13
76	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIA-1	10
77	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIA-2	10
78	Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIB	13
79	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIB-1	10
80	Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIB-2	10
81	Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media	17
82	Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I	15
83	Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IA	13
84	Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IA-1	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
85	Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IA-2	10
86	Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IB	13
87	Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IB-1	10
88	Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IB-2	10
89	Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II	15
90	Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIA	13
91	Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIA-1	10
92	Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIA-2	10
93	Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIB	13
94	Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIB-1	10
95	Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIB-2	10
96	Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan	17
97	Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I	15
98	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IA	13
99	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IA-1	10
100	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IA-2	10
101	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IB	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
102	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IB-1	10
103	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IB-2	10
104	Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II	15
105	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIA	13
106	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIA-1	10
107	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIA-2	10
108	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB	13
109	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-1	10
110	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-2	10
111	Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III	15
112	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIA	13
113	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIA-1	10
114	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIA-2	10
115	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB	13
116	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB-1	10
117	Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB-2	10
118	Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan	17

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
119	Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I	15
120	Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IA	13
121	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IA-1	10
122	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IA-2	10
123	Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IB	13
124	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IB-1	10
125	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IB-2	10
126	Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II	15
127	Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIA	13
128	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIA-1	10
129	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIA-2	10
130	Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIB	13
131	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIB-1	10
132	Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIB-2	10
133	Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	17
134	Asisten Deputi Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas	15
135	Kepala Bidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
136	Kepala Subbidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara I	10
137	Kepala Subbidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara II	10
138	Kepala Bidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas	13
139	Kepala Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas I	10
140	Kepala Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas II	10
141	Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	15
142	Kepala Bidang Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Negara	13
143	Kepala Subbidang Perencanaan Strategis Bisnis Badan Usaha Milik Negara	10
144	Kepala Subbidang Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Negara	10
145	Kepala Bidang Privatisasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara	13
146	Kepala Subbidang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	10
147	Kepala Subbidang Sinergi Badan Usaha Milik Negara	10
148	Kepala Bidang Penyertaan Modal Negara, Penerusan Pinjaman, dan Public Service Obligation Badan Usaha Milik Negara	13
149	Kepala Subbidang Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara	10
150	Kepala Subbidang Penerusan Pinjaman dan Public Service Obligation Badan Usaha Milik Negara	10
151	Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis	17
152	Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara	15
153	Kepala Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
154	Kepala Subbidang Mutasi Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara	10
155	Kepala Subbidang Pengelola Data Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara	10
156	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara	13
157	Kepala Subbidang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara	10
158	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diktat Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara	10
159	Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi	15
160	Kepala Bidang Teknologi Informasi	13
161	Kepala Subbidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi	10
162	Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi	10
163	Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pemeliharaan Teknologi Informasi	10
164	Kepala Bidang Analisis Data	13
165	Kepala Subbidang Pengelolaan Data	10
166	Kepala Subbidang Analisis dan Penyajian Informasi	10
167	Kepala Bidang Riset	13
168	Kepala Subbidang Riset Badan Usaha Milik Negara I	10
169	Kepala Subbidang Riset Badan Usaha Milik Negara II	10
170	Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	15
171	Kepala Bidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	13
172	Kepala Subbidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan I	10
173	Kepala Subbidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan II	10
174	Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
175	Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan I	10
176	Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan II	10
177	Asisten Deputi Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara	15
178	Kepala Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara I	13
179	Kepala Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara Ia	10
180	Kepala Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara Ib	10
181	Kepala Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara II	13
182	Kepala Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara IIa	10
183	Kepala Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara IIb	10

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
 NOMOR PER-05/MBU/10/2019  
 TENTANG  
 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

JABATAN FUNGSIONAL  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Perencana Utama	13
2	Perencana Madya	11
3	Perencana Muda	9
4	Perencana Pertama	8
5	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	8
6	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	7
7	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	6
8	Analisis Kepegawaian Madya	11
9	Analisis Kepegawaian Muda	9
10	Analisis Kepegawaian Pertama	8
11	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
12	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
13	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
14	Analisis Kebijakan Utama	14
15	Analisis Kebijakan Madya	12
16	Analisis Kebijakan Muda	10
17	Analisis Kebijakan Pertama	8
18	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13
19	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
20	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
21	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
22	Arsiparis Utama	13
23	Arsiparis Madya	11
24	Arsiparis Muda	9



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
25	Arsiparis Pertama	8
26	Arsiparis Penyelia	8
27	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
28	Arsiparis Pelaksana	6
29	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	11
30	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
31	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
32	Penata Laksana Barang Penyelia	8
33	Penata Laksana Barang Mahir	7
34	Penata Laksana Barang Terampil	6
35	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
36	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
37	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
38	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
39	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
40	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
41	Auditor Utama	13
42	Auditor Madya	11
43	Auditor Muda	9
44	Auditor Pertama	8
45	Auditor Penyelia	8
46	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
47	Auditor Pelaksana	6
48	Peneliti Utama	13
49	Peneliti Madya	11
50	Peneliti Muda	9
51	Peneliti Pertama	8
52	Pranata Komputer Utama	13
53	Pranata Komputer Madya	11
54	Pranata Komputer Muda	9
55	Pranata Komputer Pertama	8
56	Pranata Komputer Penyelia	8
57	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
58	Pranata Komputer Pelaksana	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
59	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER-05/MBU/10/2019  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Staf Khusus Menteri	16
2	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
3	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
5	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7
6	Pengelola Kepegawaian	6
7	Pengadministrasian Kepegawaian	5
8	Analisis Perencanaan Strategis	7
9	Analisis Perencanaan Anggaran	7
10	Analisis Kinerja	7
11	Pengelola Bahan Perencanaan	6
12	Analisis Keuangan	7
13	Analisis Perbendaharaan	7
14	Verifikator Keuangan	6
15	Pengolah Data Perbendaharaan	6
16	Pengelola Keuangan	6
17	Pengadministrasian Keuangan	5
18	Analisis Organisasi	7
19	Analisis Tata Laksana	7
20	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6
21	Analisis Hukum	7
22	Pengelola Informasi Produk Hukum	6
23	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6
24	Penyuluh Kearsipan	7
25	Pranata Kearsipan	6
26	Pengelola Perpustakaan	6
27	Pengelola Surat	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
28	Sekretaris	6
29	Pengadministrasi Persuratan	5
30	Pengadministrasi Umum	5
31	Analisis Barang Milik Negara	7
32	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
33	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6
34	Pengelola Barang Milik Negara	6
35	Pemelihara Peralatan	5
36	Pemelihara Bangunan	5
37	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5
38	Pemelihara Kendaraan	5
39	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5
40	Analisis Publikasi	7
41	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
42	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6
43	Analisis Protokol	7
44	Petugas Protokol	6
45	Analisis Konten Media Sosial	7
46	Pengolah Konten Media Sosial	6
47	Pengelola Dokumentasi	6
48	Penata Liputan	6
49	Ajudan	6
50	Analisis Manajemen Risiko	7
51	Analisis Laporan Hasil Audit	7
52	Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit	6
53	Analisis Kinerja BUMN	7
54	Analisis Hasil Penelitian	7
55	Analisis Statistik	7
56	Analisis Laporan Keuangan	7
57	Analisis Informasi	7
58	Analisis Data Ekonomi Makro	7
59	Analisis Investasi Pemerintah	7
60	Pengelola Data	6
61	Analisis Sistem Informasi	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
62	Analisis Penataan Jaringan	7
63	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO